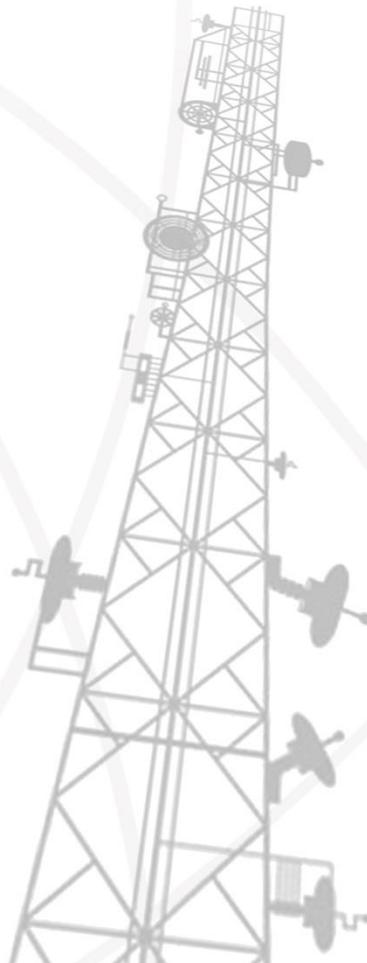
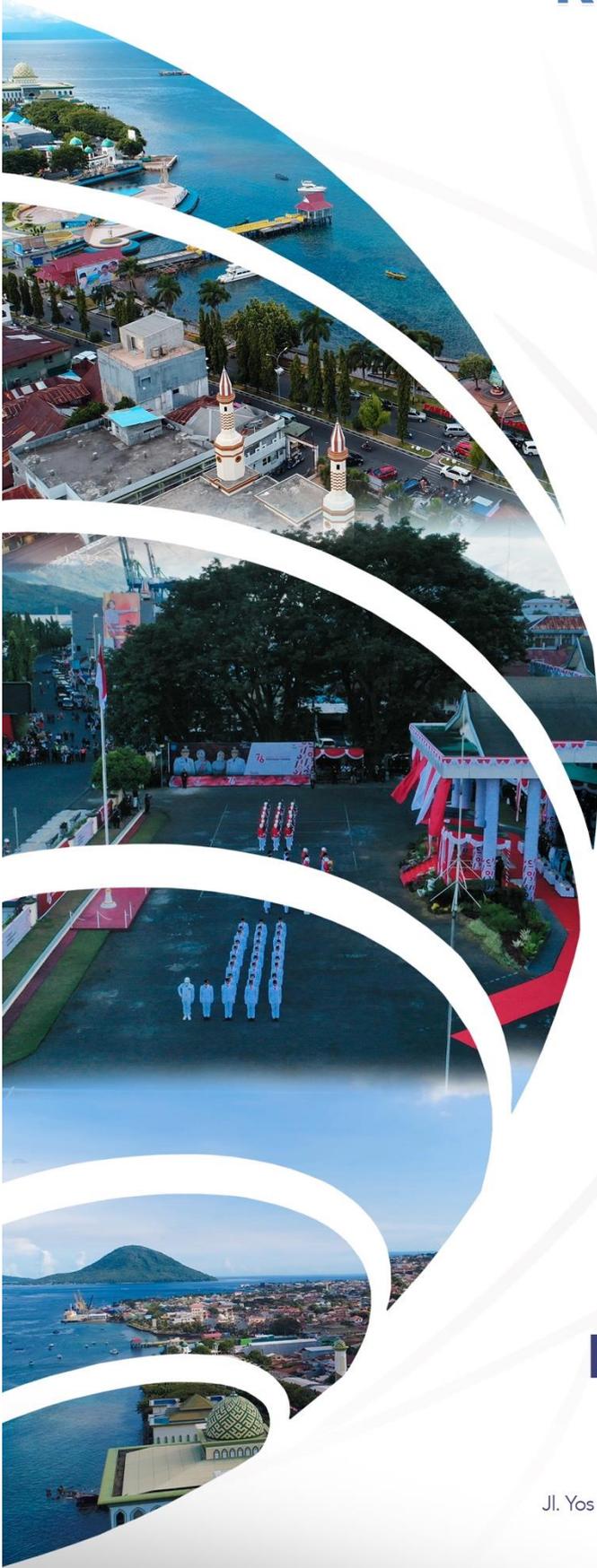


Rencana Strategi (RENSTRA) 2021 - 2026



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian



Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate

Telp : (0921) 3117734 - Fax : (0921) 3117734

Email : pemkot@ternatekota.go.id Website : <http://kominfo.ternatekota.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan RahmatNYa sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2016–2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 85 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang sesuai dengan Tuga Pokok dan Fungsi Dinas. Rencana impelmentasinya berpedoman pada Keputusan Walikota Ternate Nomor. 53.A/III.2/KT/2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai Acuan dalam Perencanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk masa 5 tahun ke depan, berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sesuai Strategi penyelesaian isu pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021-2026 sebapa upaya perwujudan Visi dan Misi Walikota Ternate Tahun 2021-2026.

Terima Kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021-2026 ini.

Ternate, 24 November 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA TERNATE

ANAS, S.Pd., MM.Par
NIP : 19671215 199512 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo dan Persandian	18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kota Ternate	36
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota	38
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo RI dan Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Maluku Utara	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	45

BAB IV	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI	
	INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	49
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi	
	Informatika dan Persandian	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Esalon Jabatan	18
Tabel 2.2.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel 2.3.	Sarana Prasarana DISKOMSANDI	20
Tabel 2.4.	Capaian Kinerja DISKOMSANDI 2016-2020	22
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pelayanan DISKOMSANDI	23
Tabel 2.6.	Data Base DISKOMSANDI	22
Tabel 2.7.	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan DISKOMSANDI	31
Tabel 3.1.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
Tabel 3.2.	Telaah Renstra Kementerian KOMINFO	42
Tabel 3.3.	Ketertarikan Antara Isu Strategis, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah	47
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jakngka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2021 - 2026	51
Tabel 5.1.	Ketertarikan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian RPJMD	52
Tabel 5.2.	Indikator Penilaian SPBE, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	53
Tabel 5.3.	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	54
Tabel 6.1.	Indikasi Rencana Program Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Strategis DISKOMSANDI Tahun 2021 - 2026.....	60
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Ternate 2021 - 2026.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Teknologi informasi pada saat ini digunakan sebagai daya ungkit efektivitas dan efisiensi. Perkembangannya yang begitu pesat memungkinkan untuk diselaraskan dengan banyaknya proses bisnis yang masih belum optimal. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang saat ini dapat dirasakan yaitu memudahkan beraktivitas dalam melihat berita dan mencari berbagai informasi. Selain teknologi informasi yang berkembang, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu data dan informasi serta keamanannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data dan informasi yang akurat dan akuntabel. Selain itu, untuk menghindari adanya gangguan pihak luar yang tidak bertanggungjawab perlu diiringi dengan peningkatan kualitas keamanan informasinya. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok perdesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur serta aplikasi yang tersedia. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara yaitu pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni dengan melakukan pemerataan infrastruktur teknologi, pendayagunaan media informasi, pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat, fasilitasi teknologi informasi yang memadai, data dan informasi akurat akuntabel serta pengamanan informasi.

Disisi lain adanya faktor tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik merupakan respon positif untuk meningkatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate sebagai jendela informasi Pemerintah Kota Ternate masih perlu dioptimalkan. Untuk itu revitalisasi peran fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Ternate khususnya kebutuhan sarana dan SDM sangat diperlukan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang semakin cepat dan semakin transparan. Selain itu, di Kota Ternate perkembangan dan transformasi media digital yang sangat cepat, Diskomsandi baik tingkat kota, maupun provinsi, dituntut untuk lebih kreatif dalam merespons dan memberikan informasi. Terlebih dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian dinamis. Dalam hal ini peningkatan kinerja dalam pengelolaan informasi publik menjadi titik sentral barometer dalam pelayanan informasi publik yang bergulir dan makin interaktif. Maka fungsi-fungsi koordinasi dan komunikasi lintas pemerintah dan swasta serta masyarakat menjadi kebutuhan mutlak. Sejalan dengan itu terus dikembangkan pola informasi publik yang makin efektif sebagai bahan koreksi peningkatan pelayanan informasi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ternate sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik sektoral Kota serta persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap Perangkat Daerah

Pemerintah Kota Ternate, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Ternate melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral Kota serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ternate untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2021- 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategi 2021 s.d. 2026 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate (RPJPD) Kota Ternate Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Ternate tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah:

1. Untuk menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate (RPJMD 2021-2026).
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh Perangkat Daerah Sesuai arah kebijakan Walikota yang termaktub dalam RPJMD 2021-2026.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas -tugas sesuai dengan kewenangannya, Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.
4. Memberikan arahan dan target yang terukur atas kinerja Dinas Komsandi dalam Bidang Urusan Bidang Informatika, Komunikasi dan Publikasi serta Statistik dan Persandian.

5. Merencanakan Penganggaran berdasarkan kebutuhan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Menentukan Program Prioritas yang selaras dengan Visi dan Misi Walikota Periode 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021 - 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah.

Berikut adalah Sistematika Penulisan dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas
	2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBAKARAN
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Diskomsandi Prov. Maluku Utara
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo dan Persandian

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate serta Peraturan Walikota Ternate Nomor. 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate menjalankan tugas pokok, yaitu;

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

b. Fungsi :

- Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
- Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang meliputi ; Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Telematika, Bidang Diseminasi Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, dan Bidang Persandian.
- Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari;

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi :

- Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Informatika membawahi :

- Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika

- Seksi Aplikasi Governance dan Perangkat Informatika

4. Bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran membawahi :

- Seksi Desiminasi Informasi;
- Seksi Perizinan, Telekomunikasi dan Penyiaran

5. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi;

- Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
- Seksi Komunikasi dan Multimedia;

6. Bidang Persandian dan Pengolahan Data , membawahi;

- Seksi Perangkat dan Admisitrasi Persandian;
- Seksi Pengolahan data Informatika

7. Kelompok Jabatan Fungsional

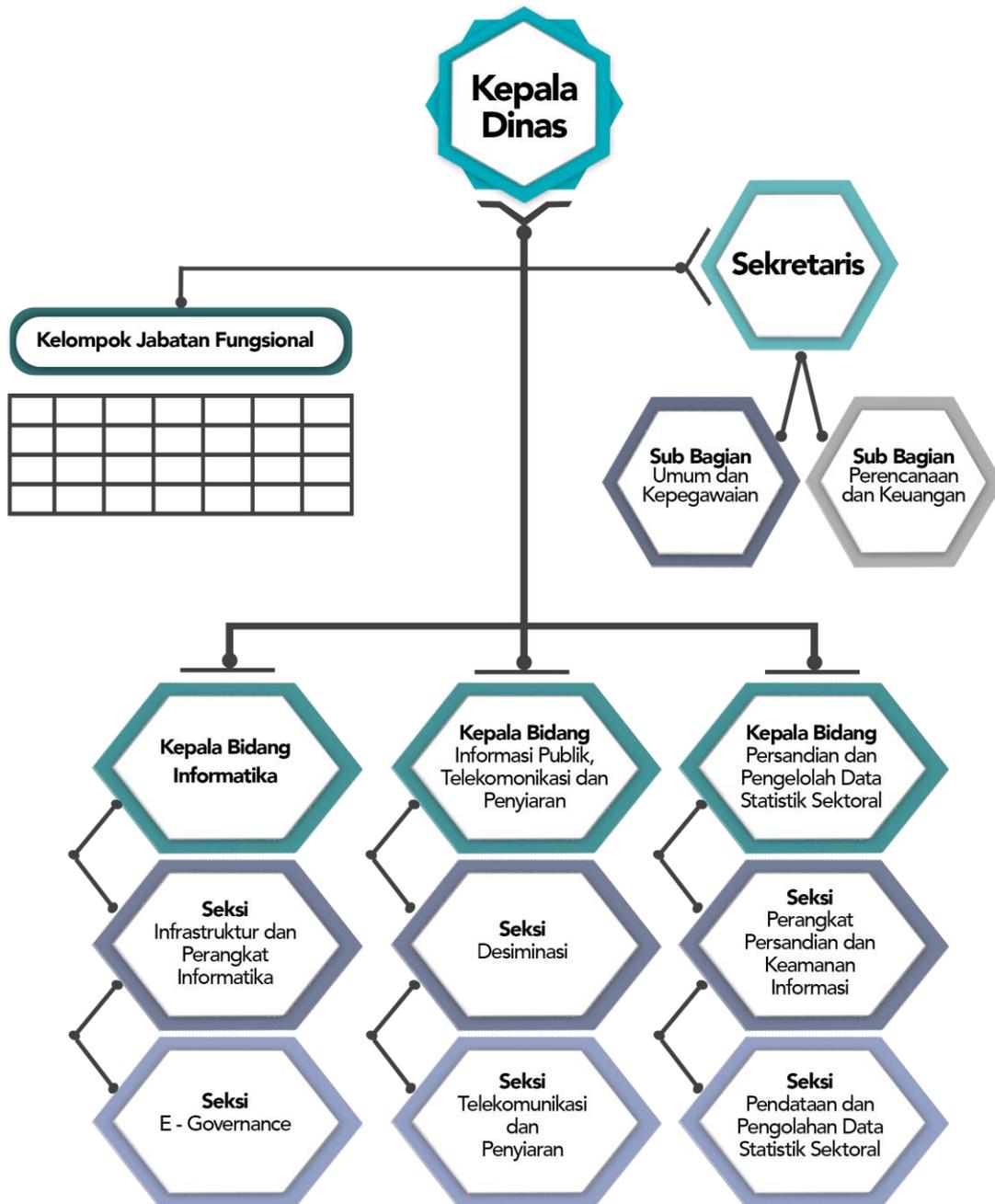
d. Jumlah Personil Susunan Organisasi Dinas Kominfo dan Persandian

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan OPD , Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki jumlah Pegawai sebanyak 19 orang PNS, dan 11 orang Pegawai Non PNS, terdiri dari;

- Eselon II b sebanyak 1 orang
- Eselon III a sebanyak 1 orang
- Eselon III b sebanyak 3 orang
- Eselon IV a sebanyak 8 orang
- Pelaksana PNS sebanyak 6 orang
- Pelaksana Non PNS 11 Orang



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian



i. **Kepala Bidang Informatika**

Ikhtisar Jabatan :

Mempunyai tugas pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi informatika, dan pengembangan kemitraan media;

Uraian Tugas Pokok :

a) Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang informatika yang berbasis kinerja;

b) Pelaksanaan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang informatika

Tahapan :

c) Pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja di bidang informatika;

d) Pelaksanaan pembinaan di bidang informatika;

e) Pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi informatika;

f) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan system informasi

Tahapan:

g) Pelaksanaan pengendalian dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang informatika;

h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;

- **Kepala Seksi Infrastruktur dan Perangkat Informatika**

Ikhtisar Jabatan :

Mempunyai tugas merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pembangunan, serta pengembangan jaringan komunikasi teknologi Pemerintah Daerah.

Uraian Tugas :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan seksi infrastruktur dan perangkat informatika;

b. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis oprasional pengembangan teknologi informatika;

- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang infrastruktur dan perangkat informatika;
- d. Melaksanakan sarana dan prasarana di bidang informatika
- e. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi meliputi perangkat keras, lunak dan jaringan komunikasi dalam rangka pembangunan system jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi melalui jaringan koneksitas website;
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembangunan Menara telekomunikasi;
- h. Melaksanakan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tupoksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Kepala Seksi E-Governance Perangkat Informatika

Ikhtisar Jabatan :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi e-governance informatika.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi E-Governance;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data informasi E-Governance;
- c. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis E-Governance;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan sarana dan prasarana komunikasi desiminasi komunikasi informasi
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang komunikasi dan desiminasi informasi;
- g. Melaksanakan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tupoksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Melaporkan hasil kegiatan seksi E-Governance sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk dijadikan bahan penyusunan program lanjutan.

ii. Kepala Bidang Informasi Publik Telekomunikasi Dan Penyiaran

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan tugas bidang Informasi Publik, Telekomunikasi dan Penyiaran

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- b. Melaksanakan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran
- c. Melaksanakan penyusunan penetapan kinerja bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran.
- d. Melaksanakan pembinaan dibidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran
- e. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi publik dan dokumentasi
- f. Melaksanakan desiminasi informasi
- g. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun tradisional
- h. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan satuan kerja Perangkat Daerah, instansi pemerintah daerah maupun pusat
- i. Melaksanakan pengendalian normal, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pos, penyiaran dan telekomunikasi
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kantor agen jasa titipan, kantor cabang dan loker pelayanan telekomunikasi
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pembangunan telekomunikasi kelurahan penyelenggaraan warung telekomunikasi dan warung seluler, telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah instalatur kabel rumah/gedung

- n. Melaksanakan pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat, penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal, serta penetapan wilayah prioritas kewajiban pelayanan universal telekomunikasi .
- o. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pos telekomunikasi serta penggunaan frekwensi di daerah perbatasan
- p. Pelaksanakan pengendalian dalam melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran.
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang informasi publik, telekomunikasi dan penyiaran.

- Kepala Seksi Telekomunikasi Dan Penyiaran

Ikhtisar Jabatan :

Melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap pers dan media massa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi telekomunikasi dan penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Melaksanakan pengumpulan data informasi di bidang perijinan telekomunikasi dan penyiaran
- c. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dalam pemetaan dan pembinaan menyangkut dengan penyiaran, pemberitaan dan rekaman
- d. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi bagi kalangan insan pers dan masyarakat
- e. Melaksanakan pemberian permohonan perijinan di bidang penyiaran pemberitaan dan rekaman
- f. Melakukan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakai jasa telekomunikasi dan di sesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- g. Melaksanakan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas

- Kepala Seksi Diseminasi Informasi

Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang diseminasi informasi.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi komunikasi dan diseminasi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membimbing dan Membina bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi perencanaan agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang diseminasi informasi.
- f. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai aplikasi telematika.
- g. Menyediakan sarana diseminasi informasi publik melalui media cetak ataupun elektronik agar penyebaran informasi dapat diterima oleh publik
- h. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi.
- i. Melaksanakan pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang diseminasi informasi.
- l. Melaksanakan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

iii. **Kepala Bidang Persandian Dan Pengolahan Data**

Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan tugas di bidang persandian dan pengolahan data meliputi pengolahan data sandi dan pengamanan data sandi

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan operasional program dan kegiatan bidang Persandian dan pengolahan data berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan Penyusunan Rencana Program Kerja dan Kegiatan Tahapan :
- c. Melaksanakan Penyusunan Rencana Perumusan Kebijakan Teknis
- d. Melaksanakan Penyusunan Penetapan Kinerja
- e. Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Teknis di Bidang Persandian
- f. Melaksanakan pengembangan data base dan pelaporan
- g. Melaksanakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian dan pengolahan data
- h. Melaksanakan dan mengendalikan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sandi
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang persandian
- j. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat terlaksana dengan baik
- k. Menyelia tugas bawahan yang telah diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang agar terlaksana dengan baik
- l. Menyelenggarakan sarana pengolahan data sandi berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku
- m. Menyelenggarakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan dokumen dan alat-alat persandian serta mengembangkan system persandian.

- Kepala Seksi Pengolah Data Informatika

Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan tugas pengumpulan Data, Informasi, Permasalahan, peraturan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pengelolaan Dokumen elektronik, Melaksanakan verifikasi dan mengelola data base dokumen elektronik

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi pengolahan data informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan
- b. Melaksanakan Penyusunan rencana kegiatan seksi pengolahan data Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam rangka penyusunan data
- c. Melaksanakan Pengumpulan, Penghimpun data dan informasi
- d. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan dan penyajian data statistic
- e. Melaksanakan pemulihan data atau system jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi
- f. Melaksanakan penerimaan pengiriman sandi dan telekomunikasi
- g. Melaksanakan pengamanan terhadap Informasi sandi dan telekomunikasi

- Kepala Seksi Perangkat Administrasi Dan Persandian

Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan Operasional pengelolaan dan sarana prasarana di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Uraian Tugas:

- a. Pelaksanaan penyusunan Peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Ternate
- b. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan keamanan berupa policy paper, naskah akademik, telahan atau memo.
- c. Pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras sandi dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Ternate
- d. Pemeliharaan Dan Perbaikan Terhadap Perangkat Lunak Persandian , Perangkat Keras Persandian Dan Jaringan Komunikasi Sandi

2.3 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dimiliki mencakup Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan , Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate memiliki pegawai sebanyak 23 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 33 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV a) sebanyak 8 orang serta pelaksana PNS sebanyak 6 orang dan Staf Pegawai Non PNS sebanyak 11 orang.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			3			3
4	Kepala Seksi/Kasubag/				8		8
5	Staf					6	6
6	Pegawai Non PNS					11	11
	JUMLAH		1	4	8	17	30

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate berdasarkan Pendidikan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang
Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	1	2	-	-	-	-	3
4	Kepala Seksi dan Kasubag	-	-	6	1	-	-	-	7
5	Staf	-	2	3	1	5	-	-	11
6	Pegawai Non PNS	-	-	3	-	7	-	-	10
Presentasi		-	8,2%	48%	6%	36%	-	-	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate yang berjumlah 33 Orang, sebanyak 4 orang (8,2%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas dan Kepala Bidang serta 2 orang Staf, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 15 orang (48%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 2 orang (6%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 12 orang (43,3%).

b. Sumber Daya Sarana Pra Sarana.

- Gedung :

Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate menempati 2 Ruang di Gedung Eks. Kantor Walikota Ternate Jl. Yos Sudarso dengan Luasan Ruangan I ± 20 m² (Ruang Studio) dan Ruang II seluas ± 180 m².

- Sarana Pendukung :

Sejak Pembentukan dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, telah mengadakan beberapa Sarana Penunjang yang terdiri dari Mebeler Kantor, Peralatan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Studio, Peralatan Jaringan dan sejumlah Peralatan lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Sarana Prasarana	Jumlah
Mebeler		
1	Meja Kerja Esslon II	1 unit
	Kursi Kerja Esselon II	1 unit
	Meja Kerja Sekretaris	1 unit
	Kursi Kerja Sekretaris	1 unit
	Meja Kerja Kepala Bidang	3 unit
	Kursi Kerja Kepala Bidang	3 unit
	Meja Kerja Esslon IV	8 unit
	Kursi Kerja Esselon IV	8 unit
	Kursi Rapat	20 unit
	Meja Rapat	2 unit
	Kursi Sofa Tamu	2 set
	Lemari Arsip Besi	6 unit
	Lemari Arsip Kayu	2 unit
	Lemari Hias	1 unit
Peralatan Kantor		
	AC Unit	10 unit
	Komputer PC	11 unit
	Laptop	11 unit
	Printer	8 unit
	TV Monitor 70 INCHI	2 unit
	CCTV 8 Channel	1 unit
	IP Camera	8 unit
	Cutting Sticker	1 unit
	Power Amp with mixer 12 CH	1 unit
	Speaker System 12"	2 unit
	Wireless Mic	1 set
Peralatan Jaringan		
	Server	1 unit
	Rak Server	1 unit
	UPS	1 unit
	Akses Point	3 unit
	Router HUB 8 Port	2 unit
Peralatan Studio		

	Sony PXW-X70 Professional XDCAM	1 buah
	Battery NP_FV70	2 buah
	Battery Canon 6D	1 buah
	DJI Phantom 4	1 buah
	Battery Phantom 4	1 buah
	Battery DJI Osmo Plus	2 buah
	Backpack DJI Phantom	1 buah
	USB Mixer with Effects	1 buah
	Wireless Microphone Seinheizer	1 set
	Behringer Eurolive F1220D Bi-Amped 250w Monitor Speaker System	2 set
	Dry Cabinet	1 buah
	Paket Stand Lighting Lamp Holder	3 set
	Tripot Kamera	2 buah
	Web Cam	3 unit
	Camera Viseo	1 unit
	Peralatan studio Visual	1 set
	Camera Foto	2 unit
Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Lainnya		
	Smart TV	2 unit
	Peralatan Tool Set	1 set

2.4 Kinerja Pelayanan Daerah

Sesuai Tugas dan Fungsinya, Dalam mewujudkan Vis-Misi Walikota, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam periode sebelumnya Melaksanakan Tugas-tugas untuk mencapai Target yang telah direncanakan melalui Renstra 2016-2021 yang mengarah pada RPJMD 2016-2021. Keberhasilan pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diukur berdasarkan Indikator yang menjadi ukuran dari setiap sasaran masing-masing program dan kegiatan. Pencapaian Indikator Program dan Kegiatan akan menentukan Capaian yang ditentukan oleh Indikator Pelayanan Minimum (IPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Lengkapnya target Indikator Kinerja beserta Capaiannya dapat disajikan dalam Tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4.

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2016 s.d. 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
1	Persentasi Pelayanan Masyarakat melalui Penggunaan TIK	%	-	15	20	25	30	-	20	20	30	40	-	75	90	83	75
2	Presentasi Ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat	%	15	40	50	65	70	20	50	60	70	75	75	80	83	93	93
3	Luas Wilayah yang Terakses Jaringan Internet/Seluler	%	25	30	30	40	55	30	40	40	50	75	83	75	75	80	73

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -				Realisas Anggaran pada Tahun ke -								Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	4	3	4	6	7	6	7	9	10	137%	73%	11	12
BELANJA DAERAH	4.548.696.409	4.498.283.532	4.148.136.914	7.747.986.914	4.290.327.735	4.339.127.904	4.463.041.103	5.683.453.009	95%	99%	137%	73%	19%	10%
Belanja Langsung	4.548.696.409	4.498.283.532	4.148.136.914	7.747.986.914	4.290.327.735	4.339.127.904	4.463.041.103	5.683.453.009	95%	99%	137%	73%	19%	10%
- Belanja Pegawai	58.016.209	1.169.743.632	1.234.567.890	1.724.437.314	1.009.978.678	1.120.029.477	1.342.652.202	1.696.973.261	117%	115%	299%	78%	70%	60%
- Belanja Barang dan Jasa	2.351.855.750	2.860.225.300	2.345.678.901	2.909.549.600	1.143.868.007	1.750.903.727	2.901.849.401	1.931.479.748	117%	101%	82%	66%	7%	-3%
- Belanja Modal	238.824.450	668.314.600	567.890.123	14.000.000	1.236.481.050	568.194.700	218.539.500	5.000.000	38%	47%	10%	48%	-55%	-65%
Total	4.548.696.409	4.498.283.532	4.148.136.914	7.747.986.914	4.290.327.735	4.339.127.904	4.463.041.103	5.683.453.009	0,92	0,92	1,33	0,68	12%	2%
Rasio APBD dengan Pagu Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate dalam Kurun 5 Tahun Terakhir														

Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2020 sesuai Sasaran Strategis dan Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis TIK

Indikator :

1. Jumlah Kecamatan yang terkoneksi Jaringan internet dan komunikasi Radio :

Hingga capaian Tahun 2020, Jumlah kecamatan yang terlayani jaringan internet sebanyak 7 Kecamatan yakni Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Selatan, Ternate Utara, Ternate Barat dan Pulau Ternate. Sedangkan 1 Kecamatan lainnya yang termasuk dalam kecamatan di luar Pulau Ternate yakni Batang Dua masih belum terjangkau Jaringan internet.

Pada Tahun 2021 ini, Dinas Komsandi mengupayakan pelayanan internet berupa pemasangan hot spot internet gratis di kecamatan pulau Hiri dengan titik Hotspot berada di Kelurahan Togolobe dengan kapasitas sebesar 20 MBps melalui Jaringan V-Sat. Pelayanan hotspot internet gratis ini dilaksanakan selama 12 Bulan. Capaian ini sudah sesuai target capaian Tahun 2020 pada Renstra Dinas Komsandi 2016-2021 yakni 7 Kecamatan, walaupun secara kualitas dan wilayah cakupan masih banyak yang harus ditingkatkan.

Di samping itu layanan internet juga diberikan pada 18 titik di OPD/Unit kerja serta fasilitas publik lainnya dengan kapasitas Bandwith 210 MBPs dengan durasi pelayanan selama 12 Bulan.

2. Jumlah Layanan Masyarakat yang dilakukan secara On Line.

Hingga Tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate mengelola Aplikasi layanan Online yang efektif digunakan dalam pelayanan masyarakat ada 2 (dua) aplikasi, yakni : Aplikasi e- Laport yang merupakan layanan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan yang terkait dengan kinerja pemerintahan dan masalah terkait lainnya serta SIAPIK, yang merupakan aplikasi layanan bagi masyarakat terkait kendala layanan dan situasi yang perlu segera ditanggulangi oleh satuan kerja Pemerintah Kota Ternate. Kedua Layanan ini berbasis Android.

Disamping itu Dinas Komsandi juga Mengelola Website resmi Pemerintah Kota Ternate dengan alamat URL <http://ternatekota.go.id>.

Di Tahun 2020 ini, Layanan berbasis Online yang masih aktif terdiri dari 2 Aplikasi baik yang berbasis Android maupun yang berbasis Website yaitu :

- Aplikasi layanan PPID, yaitu layanan Permintaan masyarakat tentang informasi Pemerintah Kota Ternate. Layanan ini berbasis website dengan alamat <http://ppid.ternatekota.go.id>
- Layanan JDIH, adalah layanan berbasis website untuk menympsiikan informasi produk hokum Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat dengan alamat : <http://jdih.ternatekota.go.id>

Dengan demikian, maka hingga Tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kota Ternate telah mengelola 6 Layanan Berbasis On Line.

Capaian ini sudah sesuai dengan Target Renstra Dinas Komsandi 2020 yakni 6 Aplikasi.

3. Jumlah Fasilitas Umum yang tercover Jaringan internet.

Hingga Tahun 2020, Fasilitas umum yang dicover jaringan internet melalui penyediaan Hotspot internet gratis berjumlah 5 Lokasi/ 5 Titik Hotspot yakni :

- Lokasi Kantor Walikota Lama Jl. Yos Sudarso
- Lokasi Kantor Walikota Baru, Jl. Pahlawan Revolusi
- Lokasi Benteng Orange
- Lokasi Depan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kote Ternate
- Lokasi Pelabuhan Sped Boat/ Masjid Almunawar

Dan di Tahun 2020 ini, akibat refocusing anggaran dan kondisi pandemic covid-19, maka terjadi pengalihan layanan internet gratis dari beberapa fasilitas publik ke layanan OPD/Unit Kerja Pemerintah terkait dengan jumlah sambungan total 18 Titik dengan kapasitas total sebesar 210 MBps selama 12 bulan pelayanan.

b. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya ketersediaan Data dan Tata Kelola Keamanan Informasi.

Indikator :

1. Jumlah data Base Informasi daerah yang akurat :

Jumlah database sektoral Pemerintah Kota Ternate hingga Tahun 2020 ini yang telah disusun sebanyak yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.6.
Date Base Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO	SUMBER DATA	JENIS DATA
1	DINAS KOPERASI	Data Koperasi dan UMKM
		Kondisi koperasi per Kelurahan
		Perkembangan modal koperasi per Kelurahan
2	BKKBN	Data KB dan KS
		Data Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Di Kota Ternate
		Data Jumlah Keluarga Sejahtera Di Kota Ternate
		Data Jumlah Keluarga Sejahtera 1 Di Kota Ternate
		Perkembangan pencapaian KB Baru
		Perkembangan pencapaian KB Aktif Tahun 2018
		Tempat Pelayanan KB
		Perkembangan Kelompok Kegiatan Keluarga Berencana
3	Dinas PUPR	Data Jembatan Penghubung di Kota Ternate
		Data Jalan di Kota Ternate
		Jenis Permukaan Jalan di Kota Ternate
		Volume Jalan Nasional di Kota Ternate
		Volume Jalan Provinsi di Kota Ternate
		Volume Jalan Kabupaten/Kota di Kota Ternate
		Data Parit di Kota Ternate
		Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
		Peningkatan kualitas Manusia ditinjau dari aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah
4	DINAS SOSIAL	Data Panti Asuhan
		Daftar Penerima Bantuan Anak Yatim / Piatu
		Daftar Penerima Bantuan Lansia Miskin
		Daftar Nama Penerima Bantuan Gakin
		Daftar Penerima Bantuan bagi Penderita Cacat Sedang
		Daftar Penerima Bantuan bagi Penderita Cacat Berat
		Daftar Penerima Bantuan bagi Anak Terlantar
		Daftar Penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni
		Daftar Nama Pemohon Santunan Kematian
5	DINAS PERHUBUNGAN	Data Titik Rawan Kecelakaan
		Data kecelakaan lalu lintas

		Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Kelengkapan Jalan
		Data Terminal dan Sub Terminal
		Data Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
		Data Perkembangan Kendaraan
		Data Tempat Parkir Kendaraan
		Data Pelayanan Dasar Perhubungan dan Fasilitas Infrastruktur untuk Aksesibilitas Daerah
6	BPBD	Data Bencana
		Data Kebakaran
		Jumlah dan Jenis Kejadian Bencana Reguler
		Data Jumlah Keluarga mengalami Bencana
		Data Jumlah Keluarga penerima Bantuan Tahun
	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Data Pemberdayaan Perempuan
		Hasil Pencapaian Indikator SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak
7	Dinas Pendidikan	Data Pendidikan Anak Usia Dini
		Data Sekolah Dasar dan SMP
		Data Rincian dan Kondisi Prasarana Sekolah Dasar tiap Kelurahan
		Data Rincian dan Kondisi Prasarana SMP dan Madrasah Tsanawiyah tiap Kelurahan
		Kondisi Bangunan Sekolah dan Fasilitas Sekolah
		Data Pendidikan Luar Sekolah
		Data Peningkatan Kualitas Manusia ditinjau dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum
8	Dinas Pertanian	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Jenis Bahan Makanan Untuk Konsumsi Penduduk Kota Ternate
		Data Jumlah Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan Kota Ternate
		Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Klasifikasi Kelas Kelompok Tani per Kecamatan
		Daftar Nama-nama Kelompok Tani
		Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	
		Data Pegawai Negeri Sipil/Asn Kota Ternate Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020
		Data Pegawai Negeri Sipil/Asn Kota Ternate Menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2020

		Data Pegawai Negeri Sipil/Asn Kota Ternate Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020
		Data Pegawai Negeri Sipil/Asn Kota Ternate Menurut Tingkat Eselonisasi Tahun 2020
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Produksi penangkapan ikan kota ternate
		Luas area budidaya ikan
		Jumlah sarana prasarana penangkapan ikan
		Data kelompok nelayan
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Ternate Dalam Angka
12	Dinas Kesehatan	
		Data Kondisi Prasarana Kesehatan
		Data Distributor Obat dan Alat Kesehatan
		Data Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
		Data kondisi Perumahan dan Sanitasi
		Data Fasilitas Kesehatan
		Daftar Penerima Bantuan Paket Pembangunan Jamban Keluarga
		Jumlah Bidan Desa Berdasarkan Kelurahan di Kota Ternate
		Hasil Imunisasi Menurut Jenis di Kota Ternate
		Banyaknya Balita Dirinci Menurut Status Gizi di Kota Ternate
13	Dinas Tenaga Kerja	
		Kondisi Ketenagakerjaan
		Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Tahun
		Jumlah Perusahaan Peserta Jamsostek dan Kasus Kecelakaan Kerja
		Perusahaan menurut Jenis Usaha, Alamat Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja
		Jumlah Perusahaan menurut Besar Kecilnya Jumlah Tenaga Kerja Tahun
		Daftar Perusahaan yang ikut Jamsostek dan Kasus Kecelakaan Kerja
		Penempatan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan
		Penempatan Tenaga Kerja dan Lowongan Pekerjaan
		Kondisi Penganggur berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun
		Kondisi Penganggur berdasarkan Wilayah dan Jenis kelamin
		Data Jumlah Karyawan Tetap pada Perusahaan di Kota ternate

Capaian ini baru mencapai 51% dari target Renstra yang disebabkan oleh Kurangnya kerjasama dari OPD sumber data serta masih kurangnya dukungan anggaran kegiatan.

2. Jumlah Jenis Media penyebaran Informasi dan Teknologi yang digunakan.

Dalam program dan kegiatan penyebaran informasi Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2020, Dinas Komunikasi, Infomatika dan Persandian menggunakan berbagai jenis media informasi yaitu :

- Media Cetak : *koran, Majalah, Buletin dll*
- Media Luar Ruang : *Baliho Spanduk, Banner, elektronik Display*
- Media elektronik Visual : *Televisi*
- Media elektronik Non visual : *Radio*
- Media Online berbasis Website :

Website Pemkot yang terintegrasi dengan 33 situs website OPD serta aplikasi layanan masyarakat

- Media Sosial berbasis Internet : *Instagram, facebook, tweeter dll*
- Media On Line berbasis Android : *Aplikasi layanan berbasis android*

Dari target 8 Jenis media yang rencanakan dalam Renstra Diskomsandi, sudah digunakan 7 Jenis atau 87 %.

3. Frekuensi Penyebaran informasi, promosi dan publikasi setiap tahun.

Target pelaksanaan frekuensi promosi dan publikasi kegiatan Pemerintah Kota Ternate yang ditetapkan sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebanyak minimal 24 Kali dalam setahun. Hingga Tahun 2020, Dinas Komsandi secara Rutin melaksanakan kegiatan promosi dan publikasi kegiatan Pemerintah Kota Ternate sebanyak lebih dari 40 kali pada promosi dan publikasi iven-iven nasional maupun event lokal yaitu :

1. Event Perayaan Hari Besar Nasional (8 Event) : HUT TNI, Hari kesaktian Pancasila, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, HUT Kemerdekaan, Iven dalam ragka Hari Kartini, iven hari Pendidikan Nasional, iven Hari kebangkitan nasional.
2. Event Perayaan Hari Besar Keagamaan (6 I Event)
3. Event Nasional lainnya (5 – 15 Event)
4. Event Lokal (8 – 18 Event)

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan capaian kinerja untuk promosi dan publikasi mencapai 112% dari Target pelaksanaan hingga Tahun 2020 yaitu 24 Kali. Disamping agenda utama rutin tersebut di atas, sejak bulan Maret hingga Agustus 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terus melaporkan perkembangan kasus Covid-19 yang terupdate setiap harinya melalui Website resmi Pemkot Ternate. Demikian halnya juga dengan penyebaran konten publikasi kegiatan Pemerintah Kota Ternate melalui Media Sosial yang keseluruhannya mencapai 368 kali/ Tahun

4. Luas Wilayah Cakupan Penyampaian Informasi Publik.

Luas wilayah cakupan penyampaian informasi publik dalam hingga 2020 yang tergolong sudah efektif mencakup 7 Kecamatan yaitu kecamatan Kota Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Selatan, Ternate Barat, Pulau Ternate, dan kecamatan Pulau Moti, Atau 87% sehingga melebihi dari target 80% yang tercantum dalam Renstra.

5. Prosentase OPD yang melaksanakan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah pengidentifikasian dan sinkronisasi OPD dalam hal pengelolaan informasi untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik dilakukan salah satunya di Tahun 2020 dengan membentuk Tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik). Tim ini bertugas untuk mengendalikan dan memberikan pelayanan atas permintaan informasi hal-hal terkait Pemerintahan daerah dari masyarakat. Tim ini di ketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur dari semua OPD Pemerintah Kota Ternate.

Kinerja pelayanan dari PPID yang merupakan representasi dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik akan diukur dari jumlah layanan yang dilaksanakan dalam 1 Tahun. Untuk Tahun 2020 dengan sudah dibentuknya Tim PPID.

Pencapaian Target-target Kinerja tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan melaksanakan sejumlah Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya yang diharapkan akan berdampak positif terhadap tujuan sasaran yang diinginkan yaitu;

1. Tingkat layanan Publik Berbasis TIK
2. Ketersediaan serta keamanan informasi dan Database Sektoral Daerah
3. Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi Pemerintah Daerah

Pada Akhir Periode, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate pada Tahun 2020 menyelenggarakan 8 Program dengan 41 Kegiatan, dimana Program Pelayanan sebanyak 3 Program dengan 14 Kegiatan Pelayanan. 3 Program pelayanan yang dilaksanakan yang mencakup Bidang Publikasi dan Desiminasi Informasi, Informatika dan Statistik sectoral serta Pengamanan Informasi sesuai RPJMD Pemerintah Kota Ternate 2016-2021 Program tersebut yaitu:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Program Pengkaijaian dan Penelitian bidang Informasi
3. Program Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.59 Tahun 2007 Tahun. Pdoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih Jelas mengenai pelaksanaan program dan capaian indikator dapat disajikan dalam tabel. 2.7. sebagai berikut :

Tabel 2.7.
antara Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Hingga 2021	Capaian Hingga 2020
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, serta Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Luas cakupan Wilayah yang bisa dilayani melalui media on-line dan Jaringan Telekomunikasi	Kecamatan	8	7

		Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Ternate Smart Island	Jumlah Wilayah yang terjangkau layanan internet	Kecamatan	8	7
			Jumlah Penyediaan Titik Hotspot internet	Lokasi	20	18
		Pemanfaatan layanan masyarakat secara elektronik	Jumlah Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan masyarakat	Aplikasi	10	2
	Meningkatkan ketersediaan Data dan Tata Kelola Keamanan Informasi	Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi	Presentase ketersediaan Data Base dan Informasi Daerah	%	80	60
		Penyusunan dan pemutakhiran data Informasi Daerah	Jumlah data informasi sektoral	Jenis	100	55
		Riset dan Penelitian bidang Pengamanan Informasi	Pengamanan Informasi Daerah	Dokumen	100	411
		Sterilisasi Ruang kerja dan fasilitas komunikasi Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Kerja Kepala Daerah yang disterilisasi dalam 1 Tahun	Unit/tahun	9	9
		Pengelolaan JDIH	Jumlah Website JDIH yang dikelola	Website	1	1

		Pengelolaan PPID	Lamanya Waktu pelayanan PPID	Hari/Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Meningkatnya Kualitas akses Informasi masyarakat dan Publikasi Pemerintah Daerah	Program Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	Prosentase rata rata Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan Oleh Pemerintah Daerah	%	80	70%
		Publikasi dan Promosi Program serta Kegiatan Pemerintah Kota Ternate	Jumlah pelaksanaan Promosi/Publikasi Program Kerja Pemerintah Kota Ternate dalam setahun	Kali	36	368
		Penyediaan Alat Studio	Jumlah Alat Studio yang disediakan	Unit	50	55
		Pendataan Lembaga Penyiaran dan postel	Frekuensi Pendataan	Kali/Tahun	4	1

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian

Periode 2016-2021 merupakan periode pertama bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan sebagai OPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang terdiri dari 3 Bidang mencakup Bidang Publikasi dan Desiminasi Informasi, Bidang Informatika serta Bidang Pengelolaan data Statisttik dan Persandian dalam upaya merealisasikan Program dan Kegiatan pada setiap tahunnya terdapat beberapa tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan yang harus dicarikan solusi dan dimanfaatkan untuk menghasilkan kontribusi positif dalam Pelayanan Masyarakat.

Secara umum, tantangan dan Peluang sepanjang periode 2016-2021 teridentifikasi Sebagai Berikut :

a. Tantangan :

1. Secara Geografis, Wilayah Pemerintahan Kota Ternate memiliki 3 Pulau lain yang terpisah dari pulau Ternate dalam jarak yang cukup jauh dengan konektivitas Perhubungan maupun Komunikasi yang kurang baik. Pada ke 3 Pulau ini terutama Pulau Moti dan Batang Dua terkendala dengan akses Komunikasi bahkan masih dikatakan minim. Hal ini disebabkan karena koneksi layanan Telepon Celluler maupun layanan Internet yang dilasanakan oleh provider telekomunikasi seperti Telkom, Telkomsel dan lain-lain masih sangat buruk untuk mencapai wilayah tersebut.
2. Keterbatasan Provider Celluler dan Internet yang beroperasi di Wilayah Kota Ternate sehingga menyulitkan dalam Kerjasama penyediaan Jaringan Komunikasi pada wilayah-wilayah terluar tersebut.
3. Keterbatasan Anggaran Daerah dan belum adanya keberpihakan pengambil kebijakan dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan dalam membangun infrastruktur Jaringan dan penyediaan Sarana komunikasi pada Daerah terluar.
4. Dalam hal penyediaan Data Sektoral di mana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berfungsi sebagai Wali Data yang merupakan gerbang tunggal output Data Sektoral Daerah belum dilengkapi dengan regulasi yang mengatur Tata Kelola Data Sektoral Daerah. Hal ini menjadi kendala dalam pengumpulan Data sektoral dari berbagai OPD untuk dikelola, diverifikasi dan ditampung dalam Data Base Data sektoral Pemerintah Kota Ternate.
5. Keterbatasan akses komunikasi, pengendalian dan pengawasan dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terhadap Kinerja Perangkat Daerah maupun kondisi Wilayah Kota Ternate. Kondisi ini diakibatkan karena belum tersedianya perangkat komunikasi data dan Command Center yang representatif. Komunikasi, Pengendalian dan pengawasan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga maupun hasil.

b. Peluang :

1. Kota Ternate merupakan Kota sebagai pusat Pendidikan di Maluku Utara yang tiap tahunnya membuka peluang bagi para pelajar di berbagai wilayah Provinsi Maluku dan bahkan sampai pada daerah Papua Barat untuk dapat menuntut ilmu di Kota Ternate. Selain itu kebijakan pembaharuan dunia Pendidikan menjadi akan memasu pengembangan dan pertumbuhan informasi dan komunikasi berbasis digitalisasi.
2. Sebagai Kota/Daerah yang memiliki Branding “*TERNATE KOTA REMPAH*”, Kota Ternate memiliki pesona alam, destinasi wisata, budaya dan sejarah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung di daerah ini sehingga percepatan pembangunan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan cepat bertumbuh dan berkembang.
3. Adanya Pelimpahan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat menentukan arah kebijakan daerah dalam hal pengembangan informasi, komunikasi dan teknologi.
4. Otonomi daerah yang luas dapat memberi peluang bagi daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMSANDI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate

Secara Garis Besar Permasalahan Daerah dan Perangkat Daerah saat ini terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana telah teridentifikasi dalam RPJMD Kota Ternate 2021-2026 adalah :

Masalah Utama Perangkat Daerah :

- Belum Optimalnya Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Masih Rendahnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur jaringan komunikasi
- Belum Optimalnya Penyediaan Data Statistik Sektoral dan Satu Data.
- Belum Optimalnya Management Pengelolaan Persandian

Masalah Daerah terkait Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika :

- Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Belum Optimalnya Pelaksanaan Smart City
- Masih Rendahnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur Jaringan komunikasi

Masalah Daerah terkait Bidang Urusan Statistik :

- Belum Optimalnya penyajian Data Sektoral sesuai kebutuhan informasi Pembangunan Daerah
- Belum terciptanya system Satu Data sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
- Belum Tepatnya waktu penerbitan publikasi data dan informasi Statistik Daerah

Masalah Daerah terkait Bidang Urusan Persandian :

- Belum Optimalnya Pengelolaan Persandian dan pemanfatannya.

Dalam Upaya penyelesaian Masalah Daerah dan Perangkat Daerah di atas, oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dibentuk sejak 2016 dalam perodesasi pertama 2016-2021 telah melaksanakan 8 Program dengan 3 Program Pelayanan yang mencakup 14 Kegiatan. Dalam perjalanan pelaksanaan Program dan Kegiatan, ditemui beberapa Kondisi, kendala dan masalah yang memerlukan perhatian lebih dan Tindak lanjut yang konkrit untuk memperbaikinya. Kondisi atau gambaran umum dari Hambatan atau kendala khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Struktur Geografis wilayah Pemerintah Kota Ternate yang terdiri dari Pulau ternate dan 3 Pulau kecil lainnya yang terpisah dalam jarak cukup berjauhan. Hal ini menyulitkan dalam jangkauan akses pelayanan di bidang Komunikasi dan Informasi.
2. Masih Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur baik dari Sisi Kualitas maupun Kuantitas Aparatur yang memiliki Kapabiliitas dan Ketrampilan di bidang Teknologi Informasi.
3. Infrastruktur dan Sarana Komunikasi, Informatika dan Persandian yang tersedia masih sangat minim terkait dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik secara efektif dan aman.
4. Konektifitas antar OPD dalam rangka koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Program Pemerintah dan perwujudan e-Government belum bisa terlaksana secara baik.
5. Belum efektifnya pelayanan terhadap masyarakat, yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama dalam layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat.
6. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
7. Belum adanya Regulasi Daerah yang memadai di Bidang Komunikaasi, Informatika dan Persandian sehingga mampu melibatkan Seluruh Perangkat Daerah untuk bersinergi dalam Penerapan SPBE dan Pelayanan Masyarakat berbasis TIK.
8. Di bidang Pengelolaan Data Statistik Sektoral masih terdapat hambatan mengenai penyediaan data dari prangkat Daerah terkait. Hal ini menghambat pewujudan Program Satu Data Kota Ternate, di mana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berfungsi sebagai Walidata.

9. Penerapan sewa bandwidth internet yang belum dilakukan satu pintu sehingga ada potensi ketidakefisienan dalam penganggaran. Hal ini karena setiap Perangkat daerah dan Unit Kerja berlangganan secara sendiri-sendiri layanan internet, sehingga penggunaan Bandwidth sangat tidak terkontrol.
 10. Yang terakhir adalah belum adanya keberpihakan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara optimal.
- Permasalahan dan hambatan tersebut di atas harus dicarikan solusinya dan segera diperbaiki, agar fungsi Dinas Komunikasi dan Persandian bisa berjalan secara maksimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, yang tertuang dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan”

- Ternate Andalan –

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, akan merumuskan 8 (delapan) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Kedelapan rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate di tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Ekstraktif dan Responsif.
3. Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

4. Menumbuh - kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan 7 nilai dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*).
5. Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama dalam Berekonomi.
6. Setiap Warga Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dalam memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
7. Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu.
8. Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Ternate tersebut akan ditempuh melalui 14 (empat belas) Program Prioritas pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2026, yaitu :

- 1) Pengembangan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan daya saing industry kreatif, UMKM dan IKM
- 2) Pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua
- 3) Mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua
- 4) Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- 6) Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional.
- 7) Perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya
- 8) Membangun dan menghidupkan entitas keragaman social budaya masyarakat.
- 9) Revitalisasi dan penataan pola ruang kota yang berkelanjutan
- 10) Industrialisasi pengelolaan sampah secara partisipatif
- 11) Konservasi sumber daya air
- 12) Literasi dan Mitigasi kebencanaan
- 13) Pengembangan kota sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa
- 14) Revitalisasi dan penguatan peran BUMD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, maka misi yang memiliki arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian yang merupakan urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate adalah pada Misi ke 1 (satu) yaitu :

“Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”, dan Misi ke 2 (dua) yaitu : “Terciptanya Tata Kelolah Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif”.

Tabel 3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi/ Program KDH	Indikator Kinerja (tujuan/inpact/outcome)	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Misi ke 1 (satu) “Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional”				
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya Jaringan Komunikasi yang memadai antara Pemerintah dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan anggaran untuk urusan komunikasi, informatika dan persandian akibat dari Pandemi Covid-19. 2. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 	Faktor Penghambat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas, Kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Koordinasi internal belum optimal 3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai 4. Pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kota Ternate yang belum optimal. 5. Minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral yang mengakibatkan tidak optimalnya dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis statistik sektoral
Misi ke 2 (dua) “Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif”.				
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemda dalam Tiap Tahun Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal. 	Faktor Pendukung : <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskomsandi perlu untuk mempertahankan realisasi ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran yang sesuai target yang ditetapkan 2. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi, kewenangan sebagai pelayan informasi publik, kewenangan sebagai pusat data dan informasi serta kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasielektronika dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data sektoral belum optimal. 2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal 	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Sektoral	Masih menurunnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah Kota Ternate	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya sistem keamanan Informasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment. 2. Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kota Ternate 	

			keamanan informasi pemerintah Kota Ternate
			3. Ketaatan regulasi dalam keamanan informasi Pemerintah Kota Ternate

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sinergis dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik”. Permasalahan yang muncul pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk mencapai sasaran tersebut antara lain Faktor yang menghambat atau penyebab dari permasalahan pertama yakni pada kurangnya akses transparansi yang mengakibatkan kesulitan publik mengakses data informasi komunikasi, pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian Pemerintah Kota Ternate yang belum optimal, minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah Kota Ternate mengakibatkan tidak optimal dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan pengelolaan analisis data statistik sektoral.

Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika selanjutnya yang sinergis dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Faktor atau penghambat dari permasalahan ketiga yakni masa Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari sasaran yang telah ditetapkan serta terhambatnya infrastruktur dan ekosistem informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk pelayanan publik.

Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimaksudkan untuk melihat kesesuaian strategis tersebut dengan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

<p>Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>	<p>Permasalahan PD</p>	<p>Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung</p>
<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya akses transparansi tentang pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kota Ternate 2. Belum optimalnya pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kota Ternate 3. Belum Optimalnya ketersediaan dokumen statistik sektoral Kota Ternate 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya akses transparansi yang mengakibatkan kesulitan publik mengakses data informasi komunikasi 2. Pengamanan informasi pada penyelenggaraan persandian pemerintah Kota Ternate yang belum optimal 3. minimnya ketersediaan dokumen statistik sektoral pemerintah Kota Ternate mengakibatkan tidak optimal dalam koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan pengelolaan analisis data statistik sektoral <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan jaringan komunikasi dan informatika yang ada pada Kota Ternate untuk keterbukaan serta transparansi di informasi dan komunikasi. 2. Ketaatan regulasi dalam keamanan informasi Kota Ternate dengan penetapan kebijakan tata kelola keamanan. 3. Meningkatkan infrastruktur aplikasi yang mengembangkan kapasitas statistik sektoral
<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Pandemi Covid-19 yang berakibat pada berkurangnya anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika</p>	<p>Faktor Penghambat :</p>

		<p>Masa Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari sasaran yang telah ditetapkan</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <p>Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate perlu untuk mempertahankan realisasi ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.</p>
--	--	---

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara

Dalam Renstra Privinsi Maluku Utara, ada 2 Program Prioritas beserta sasarannya yang bersinergi dengan Program dan sasaran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate yakni :

1. Mengakselerasi Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah.

Pada Sasaran 2 disebutkan :Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah. strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah dengan Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur konektifitas untuk daya saing wilayah, dengan penekanan pada: Meningkatkan kondisi struktural dan fungsional jalan provinsi; Menata dan mengembangkan sistem transportasi wilayah multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau; *Memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas infrastruktur Teknologi Innformasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong transformasi digital dan efektifitas penerapan e-government.*

2. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Pada Sasaran 1: *Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik*

pemerintah daerah. pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan kapasitas ASN untuk menggunakannya; dengan penekanan pada percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu.

Menelaah Renstra Provinsi di atas, upaya untuk membangun konektivitas Daerah sehingga mengurangi tingkat keterisolasian wilayah dan membeikkan akses yang lebih baik pada semua Wilayah di lingkup Provinsi Maluku Utara. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah Kota Ternate yang dibreakdown dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dnas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate. Konektivitas Jaringan komunikasi yang baik untuk seluruh wilayah dalam Pemerintahan Kota Ternate akan memberikan kontribusi positif terhadap rencana strategis Pembangunan Provinsi Maluku Utara tersebut.

Tujuan dan sasaran yang sama juga terhadap perbaikan kualitas layanan publik dan Sistem Pemerintahan. Pemerintah provinsi akan mempercepat proses Digitalisasi system pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan dengan penerapan SPBE. Langkah ini juga menjadi salah satu target kinerja dari Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Target kinerja dan sasaran capaian program Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Ternate ini merupakan Sinkronisasi dari Genda Pembangunan Nasional yang termuat dalam RPJMN yakni Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, salah satunya melalui Percepatan transformasi Digital.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kota Ternate tidak berkorelasi dengan kondisi Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup. Kajian lingkungan hanya berkaitan topografi daerah dan jarak. Kajian mengenai topografi wilayah dan jarak sangat dibutuhkan dalam perencanaan dalam rangka konektivitas jaringan komunikasi, baik Jaringan berbasis Digital maupun analog. Topografi Wilayah Pulau Ternate dan serta ke 3 pulau lainnya Moti, Hiri dan Batang Dua adalah wilayah yang memiliki perbukitan. Posisi pulau Moti dan Pulau Ternate masih diantarai oleh 3 Pulau lainnya yaitu Maitara dan Mare. Sedangkan Posisi pulau-pulau Batang Dua terletak pada Jarak yang Jauh dari Pulau Ternate. Kondisi ini yang memerlukan perencanaan teknis yang baik dalam upaya melakukan konektivitas jaringan komunikasi, terutama Jaringan Internet.

Rencana implementasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate selama 5 (lima) tahun (Tahun 2021-2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kota Ternate. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kota Ternate.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Di atas sudah diuraikan berbagai permasalahan Daerah dan Permasalahan OPD yang dihadapi serta telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Povinsi, Dari uraian tersebut dapat diambil telaahan dari sisi Internal dan Eksternal dari Kondisi saat ini yaitu

a. Kekuatan/ Strength (S)

- Adanya pergantian Kepala Daerah ke yang lebih Visioner dan Inovatif menjamin adanya komitmen perbaikan kebijakan serta mampu mendorong adaptasi terhadap kebaruan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik..
- Visi Misi Walikota yang menitikberatkan pada Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Adanya Komitmen membangun konektivitas wilayah antar pulau di wilayah Pemerintah Kota Ternate
- Adanya Stake holders yang bisa diajak untuk berseinerji dalam Pembangunan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Penerapan teknologi informasi di bidang pemerintahan sudah diaplikasikan, meskipun masih sangat terbatas.

b. Kelemahan/ weakness (W)

- Pemanfaatan Sumber daya aparatur yang belum maksimal dalam pelayanan yang disebabkan minimnya sarana penunjang pelaksanaan tugas.
- Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien.
- Rendahnya Kerjasama antar Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yang memerlukan partisipasi Perangkat Daerah lain.
- Ketersediaan Ruang Kerja yang belum representatif

c. Peluang/ opportunities (O)

- Sebagai Kota Pulau, Ternate memiliki daya Tarik tersendiri terutama dari destinasi wisata sehingga akan merangsang terbentuknya inovasi baru dalam pelayanan berbasis Digital.
- Ternate sebagai pusat pendidikan di Maluku Utara menjadi daya tarik bagi para pendatang dan kaum terpelajar.
- Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah.
- Otonomi daerah yang luas membuka peluang daerah untuk terus meningkatkan perbaikan pelayanan publik

d. Ancaman/ Treaths (T)

- Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga membutuhkan akntabilitas kinerja Pemerintahan yang lebih baik dan transparan.
- Banyaknya Potensi penyalahgunaan media berbasis teknologi informasi
- Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sehingga kebutuhan Jaringan dan areal jangkauan akses informasi yang semakin luas.
- Adanya Potensi Bencana Alam dan Bencana non alam seperti wabah Covid-19 akan bisa menjadi kendala dalam pembangunan.

Isu Strategi Pemerintah Daerah yang berkorelasi langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate adalah isu “Masih Kentalnya Budaya Primordialisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.

Isu Strategis dibuat berdasarkan Masalah yang telah teridentifikasi sebagai Masalah daerah dan Masalah Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Isu Strategis, Masalah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Keterkaitan Antara Isu Strategis,, Masalah Daerah dan Masalah Utama Perangkat Daerah

ISU STRATEGI DAERAH	MASALAH DAERAH	MASALAH UTAMA PERANGKAT DAERAH
Masih Kentalnya Budaya Primordialisme Ddalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Berbasis Elektronik belum Optimal (Smart Governance)	Belum Optimalnya Domain Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Masih rendahnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
		Belum Optimalnya Penyediaan Data Statistik Sektoral dan pelaksanaan Satu Data
		Belum Optimalnya Manajemen Penelolan Persandian

Berdasarkan uraian masalah dan analisa di atas, maka ditetapkan isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate dalam perode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya untuk menunjang kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Perlu adanya Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika

2. Urusan Statistik :

- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Data dan Informasi sebagaimana dibutuhkan untuk Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan daerah.

3. Urusan Persandian :

- Belum Semua Unit Kerja memiliki Standard Pelayanan/SOP.
- Belum Maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang Persandian dan keamanan Informasi.

Isu strategis tersebut adalah acuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Pesandian untuk menetapkan program dan kegiatan dalam setiap Tahun Anggaran.

Untuk mewujudkan Program dan Kegiatan, terdapat beberapa faktor pendorong yang diharapkan menjadi peluang pelaksanaan dan pengembangan Program dan Kegiatan. Beberapa Peluang yang dan faktor Pendorong yang bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya dukungan kebijakan pimpinan dan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Kerjasama yang baik dengan berbagai media massa dan lembaga-lembaga koalisi masyarakat yang ada di kota Ternate dalam rangka mempercepat penyampaian Informasi kepada masyarakat.
3. Adanya dukungan sarana Informasi (surat kabar, radio,TV dan Internet) sebagai media Komunikasi dan publikasi..
4. Tersedianya berbagai Lembaga dan program pengembangan SDM di bidang Informasi dan Komunikasi yang dapat diakses oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk pengembangan Sumber Daya Aparatur
5. Tersedianya berbagai Informasi dari dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota yang dibutuhkan masyarakat.
6. Semakin Luas jangkauan layanan provider Internet di Kota Ternate sehingga bisa membantu dalam memfasilitasi penyediaan Jaringan Internet ke seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate.

Disamping Faktor Pendukung dan factor pendorong, terdapat pula faktor penghambat dan Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yaitu ;

1. Keterbatasan pilihan provider internet yang memungkinkan untuk menyediakan layanan internet ataupun celuller yang bisa menjangkau wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.
2. Masih rendahnya Kerjasama antar OPD dalam upaya peningintegrasian Jaringan, Data dan Informasi.
3. Kurangnya SDM yang handal di bidang TIK dan pengelolaan informasi.

BAB IV

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan Visi Kota Ternate yang Mandiri Dan Berkeadilan, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai target Misi 1 yaitu: “*Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional*”, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.
3. Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.
3. Optimalnya Pengendalian Inflasi.

Untuk mencapai target Misi 2 yaitu: ***“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif”***, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja.
3. Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Optimalnya Implementasi Manajemen ASN.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
4. Optimalnya Penerapan Zona Integritas.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan upaya perwujudan misi Walikota Ternate Tahun 2021-2026 ini, dapat di lihat pada Tabel 4.1. dibawah ini;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kota Ternate Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPIMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang berbasis TIK	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE dari Evaluator KEMENPAN & RB RI	0	1,8 - 2,6	2,6 - 3,5	3,5 - 4,2	4,2 - 5	5
		Tingkat pelayanan Masyarakat melalui media online	Jumlah Layanan Pemerintah berbasis aplikasi dibagi target layanan Pemerintah Kota Ternate berbasis aplikasi dikali 100%	44%	50%	75%	81%	88%	90%
		Tingkat ketersediaan Data Base Informasi Daerah yang Akurat	Jumlah Data Base Tersedia dibagi dengan target Data base Prangkat Daerah pada Pemerintah Kota Ternate dikali 100%	34,4%	40,6%	46,9%	50,0%	62,5%	75,0%
		Cakupan Wilayah yang terakses jaringan internet /celluler	Jumlah Rata-rata Presentasi Area Kecamatan yang terintegrasi dengan jaringan internet dan jaringan Telekomunikasi Radio dan Jumlah Konektifitas Internet Layanan Publik (Hotspot) ruang publik Kecamatan Lingkup Kota Ternate	80%	85%	90%	93%	97%	100%
		Cakupan Wilayah pelayanan informasi dan publikasi	Jumlah Kecamatan yang terakses Media Informasi dibagi dengan Jumlah Kecamatan Lingkup Pemkot Ternate dikali 100%	25%	38%	63%	75%	87%	94%
		presentasi ketersediaan Data Statistik Sektoral	Jumlah ketersediaan Data Statistik Prangkat daerah yang terintegrasi dibagi dengan jumlah Prangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ternate dikali 100%	35%	50%	60%	70%	80%	90%
		Indeks Keamanan Informasi	Indeks KAMI ISO/IEC 27001:2013	174	270	312	455	535	645

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Target dalam Tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian misi RPJMD tersebut di atas dengan indikator Pencapaian Indeks SPBE, maka STRATEGI yang dilakukan adalah dengan **Mengimplementasikan Reformasi Birokrasi melalui Optimalisasi pencapaian akuntabilitas kinerja berbasis Digital**. Selanjutnya Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat digambarkan sebagai Berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian RPJMD

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
<i>Misi 1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional</i>					
<i>Misi 2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif</i>					
1	Menghilangkan Budaya Primordialisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Sistem Pemerinthan Berbasis Elektronik	INDEKS SPBE	Implementasi Reformasi Birokrasi melalui optimalisasi pencapaian akuntabilitas kinerja berbasis Digitalisasi Sektor Pemerintah

Strategi yang amanatkan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan dan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai Indikator Sasaran yang ditentukan Dengan focus pada perbaikan pada Indeks SPBE yang kriteria penilaiannya berdasarkan indikator sebagaimana disajikan dalam table 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2

Indikator penilaian SPBE, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE

DOMAIN 1 KEBIJAKAN INTERNAL SPBE			
Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE	
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Indikator
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum		
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System		
17	Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah		
DOMAIN 2 TATA KELOLA SPBE			
Aspek 3 Kelembagaan		Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	22	Pengoperasian Pusat
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	23	Integrasi Sistem Aplikasi
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan		24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah		
21	Anggaran dan Belanja TIK		

DOMAIN 3 LAYANAN SPBE			
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik	
25	Layanan Naskah Dinas	32	Layanan Pengaduan Publik
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
27	Layanan Manajemen Perencanaan	34	Layanan Whistle Blowing System
28	Layanan Manajemen Penganggaran	35	Layanan Publik Instansi Pemerintah
29	Layanan Manajemen Keuangan		
30	Layanan Manajemen Kinerja		
31	Layanan Pengadaan		

Dalam upaya mewujudkan target Kinerja jangka menengah Sesuai Sasaran dan sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagaimana telah diuraikan pada BAB IV, maka diperlukan Strategi dan kebijakan yang tepat. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian telah menentukan strategi dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sebagaimana dapat dijelaskan melalui table berikut ;

Tabel 5.3
Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PD	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan pelayanan publik	1. Penyediaan Infrastruktur Jaringan TIK 1. Penyediaan Regulasi tingkat daerah terkait pelaksanaan SPBE 2. Penyediaan dan Penerapan Aplikasi yang terkait dengan

			<p>pelaksanaan e-Government dan layanan masyarakat.</p>
			<p>3. Pengembangan Command Center yang dapat diakses langsung oleh Walikota/Wakil Walikota</p>
			<p>1. Penyediaan Bandwith Internet untuk distribusi layanan ke Perangkat Daerah</p>
			<p>2. Pengemangan Sumber Daya Aparatur di bidang Informatika</p>
2	<p>Meningkatnya kualitas penyajian Data Statistik serta Tata Kelola Keamanan Informasi</p>	<p>Melengkapi dan mengamankan Data Sektoral Daerah</p>	<p>1. Mengumpulkan dan pemutakhiran data informasi daerah untuk dijadikan data base</p>
			<p>2. Mewujudkan Sistem Satu Data</p>
			<p>3. Melaksanakan pengamanan Data dan Inormasi</p>
			<p>4. Pengemabngan Sumber Daya Aparatur di bidang Keamanan Informasi</p>

3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Masyarakat dan Publikasi Pemerintah Daerah	Mempermudah masyarakat dalam akses informasi	1. Pemanfaatan sebanyak-banyaknya media dalam penyebaran Informasi
			2. Meningkatkan frekuensi penyampaian informasi publik
			3. Memperluas wilayah masyarakat yang memperoleh akses informasi
			4. Mengoptimalkan Kinerja layanan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
			5. Kerjasama dengan Media Cetak dan elektronik dalam Pengelolaan konten dan Penyebaran Informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate sesuai dengan pendanaan indikatif, maka ditetapkan kegiatan untuk belanja urusan wajib sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN/Non ASN
 - ✓ Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Kegiatan : Administrasi Umum
 - ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - ✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- ✓ Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Rapat-rapat koord. dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
 - ✓ Kendaraan Dinas Operasional Dinas Roda Dua
 - ✓ Pengadaan Peralatan Kantor
 - ✓ Pengadaan Mebelair
 - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
 - ✓ Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/operasional
 - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
4. Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan formal
 - ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Layanan Hubungan Media
- ✓ Panganan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik
- ✓ Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Kegiatan : Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- ✓ Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan berbasis Elektronik
- ✓ Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas
- ✓ Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data Statistik Sektoral
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik
 - ✓ Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selengkapnya lihat Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021/2026:

Tabel 6.1
Indikasi rencana program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan
Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tahun 2021-2026

Kode Bidang Urusan dan Program	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Perangkat daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Kinerja dan Usulan Pendanaan												Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN)					8.913.232.941		11.673.806.368		12.504.594.467		13.079.607.778		13.841.115.390		14.013.912.457	
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			90	95	8.256.080.941	95	10.510.062.368	95	11.239.662.967	95	11.738.287.835		12.402.243.330		12.537.632.746	Diskomsandi
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	90	95	3.577.680.941	95	3.128.803.168	95	3.377.374.587	95	3.558.927.429	95	3.792.462.952	95	3.865.249.657	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95	45.449.440	95	48.060.100	95	51.000.000	95	55.000.000	95	60.962.952	95	62.724.333	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			95	7.980.340	95	7.801.000	95	8.000.000	95	9.000.000	95	9.430.431	95	9.800.000	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			95	9.860.800	95	12.700.800	95	3.250.000	95	3.750.000	95	4.500.000	95	4.650.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		0		95	3.250.000	95	3.750.000	95	4.500.000	95	4.650.000	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0		0		95	3.250.000	95	3.750.000	95	4.500.000	95	4.650.000	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0		0		95	3.250.000	95	3.750.000	95	4.500.000	95	4.650.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan			95	10.000.000	95	10.050.000	95	12.000.000	95	12.000.000	95	14.000.000	95	14.200.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95	17.608.300	95	17.508.300	95	18.000.000	95	19.000.000	95	19.532.521	95	20.124.333	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.128.535.711	95	2.129.706.630	95	2.138.800.587	95	2.146.017.000	95	2.220.500.000	95	2.232.000.000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			95	2.113.400.411	95	2.114.465.630	95	2.118.500.587	95	2.120.500.000	95	2.190.000.000	95	2.200.000.000	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0		0		95	3.100.000	95	2.800.000	95	3.500.000	95	3.800.000	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			0		0		95	3.100.000	95	2.800.000	95	3.500.000	95	3.800.000	
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		0		95	3.100.000	95	2.800.000	95	3.500.000	95	3.800.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		0		95	3.100.000	95	2.800.000	95	3.500.000	95	3.800.000	
2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0		0		95	2.300.000	95	2.800.000	95	3.500.000	95	3.800.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan			95	15.135.300	95	15.241.000	95	3.100.000	95	7.517.000	95	8.000.000	95	8.000.000	
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		0		95	2.500.000	95	4.000.000	95	5.000.000	95	5.000.000	

2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.700.000	95	8.500.400	95	12.000.000	95	14.000.000	95	17.000.000	95	18.000.000	
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		95		95		95		95		
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		95		95		95		95		
2.16.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian		0		0		95	3.000.000	95	4.000.000	95	5.000.000	95	5.000.000	
2.16.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		95		95		95		95		
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		95		95		95		95		
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		95	8.700.000	95	8.500.400	95	9.000.000	95	10.000.000	95	12.000.000	95	13.000.000	
2.16.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		95		95		95		95		
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.16.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		0		0		0		0		0		0		
	<i>(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)</i>			0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		0		0		0		0		0		0		
	<i>(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)</i>			0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		0		0		0		0		0		0		
	<i>(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)</i>			0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0		0		0		0		0		0		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			95	47.294.000	95	57.392.000	95	90.074.000	95	100.910.429	95	120.000.000	95	128.500.000	
2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0		0		95	11.000.000	95	6.000.000	95	10.000.000	95	11.000.000	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0		0		95		95		95		95		
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0		0		95	1.500.000	95	3.000.000	95	5.000.000	95	5.000.000	
2.16.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0		0		95	1.500.000	95	3.910.429	95	5.000.000	95	5.000.000	
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		95	7.800.000	95	7.100.000	95	7.500.000	95	8.000.000	95	9.000.000	95	10.000.000	
2.16.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun		0		0		95		95		95		95		

2.16.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0		0	95		95		95		95		
2.16.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	0		0	95		95		95		95		
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	39.494.000	95	50.292.000	95	52.574.000	95	55.000.000	95	60.000.000	95	65.000.000
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0		0	95	6.000.000	95	10.000.000	95	12.000.000	95	13.000.000	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0		0	95	10.000.000	95	15.000.000	95	19.000.000	95	19.500.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		95	495.006.010	95	335.216.990	95	335.500.000	95	451.000.000	95	511.000.000	95	525.000.000
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95	10.638.800	95	10.638.840	95	11.000.000	95	12.500.000	95	15.000.000	95	17.000.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95	199.631.900	95	100.802.300	95	110.000.000	95	115.000.000	95	130.000.000	95	132.000.000
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	95	14.914.000	95	15.915.000	95	17.000.000	95	17.500.000	95	19.000.000	95	20.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	95	54.098.840	95	54.102.500	95	52.000.000	95	54.000.000	95	58.000.000	95	60.000.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	95	1.638.470	95	17.601.350	95	18.000.000	95	19.000.000	95	20.000.000	95	21.000.000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95	14.750.000	95	15.700.000	95	17.500.000	95	18.000.000	95	19.000.000	95	20.000.000
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Materia	Tersedianya Bahan/Material	0		0	95		95		95		95		
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	0		0	95		95		95		95		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	184.334.000	95	120.457.000	95	110.000.000	95	115.000.000	95	120.000.000	95	120.000.000
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		0	95		95		95		95		
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0		0	95		95	100.000.000	95	130.000.000	95	135.000.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95	103.888.600	95	99.511.870	95	211.000.000	95	215.000.000	95	230.000.000	95	240.000.000
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0		0	95	100.000.000	95	100.000.000	0		0		
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0		0	0		0		95	100.000.000	95	100.000.000	
2.16.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	0		0	0		0		0		0		
2.16.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0		0	0		0		0		0		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	95	27.300.000	95	26.207.870	95	29.000.000	95	30.000.000	95	40.000.000	95	45.000.000

2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		95	76.588.600	95	73.304.000	95	82.000.000	95	85.000.000	95	90.000.000	95	95.000.000
2.16.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				487.041.180	95	268.649.178	95	274.000.000	95	291.000.000	95	315.000.000	95	333.025.324
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		95	4.194.000	95	5.194.600	95	6.000.000	95	8.000.000	95	10.000.000	95	12.025.324
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		95	20.733.500	95	20.802.992	95	21.000.000	95	25.000.000	95	30.000.000	95	33.000.000
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		95	62.493.680	95	60.930.886	95	62.000.000	95	68.000.000	95	75.000.000	95	78.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		95	399.620.000	95	181.720.700	95	185.000.000	95	190.000.000	95	200.000.000	95	210.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95	130.883.000	95	90.883.000	95	132.500.000	95	143.000.000	95	159.000.000	95	163.000.000
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		95	40.230.000	95	40.230.000	95	41.000.000	95	45.000.000	95	49.000.000	95	50.000.000
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45	40.540.000	95	20.540.000	95	41.000.000	95	43.000.000	95	48.000.000	95	49.000.000
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		95	50.113.000	95	30.113.000	95	50.500.000	95	55.000.000	95	62.000.000	95	64.000.000
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.16.02.2.01	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%	70	70	1.436.160.000	75	2.378.579.200	80	2.616.453.880	85	2.809.538.684	90	3.051.013.693	90	3.168.800.069
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			0		73	100.000.000	80	120.000.000	85	140.000.000	90	156.010.000	90	160.000.000
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			0		73	230.000.000	80	250.000.000	85	260.000.000	90	280.000.000	90	290.000.000
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			0		73	230.000.000	80	250.000.000	85	260.000.000	90	290.000.000	90	299.000.000
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			70	261.000.000	73	84.000.000	80	100.000.000	85	120.334.000	90	155.000.000	90	159.800.069
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			70	295.100.000	73	123.441.500	80	100.053.880	85	120.000.000	90	130.000.000	90	135.000.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			70	285.060.000	73	118.020.700	80	100.000.000	85	130.000.000	90	135.001.231	90	140.000.000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			70	295.000.000	73	800.000.000	80	853.000.000	85	880.000.000	90	950.001.231	90	970.000.000
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			0		73	180.000.000	80	193.400.000	85	198.000.000	90	200.000.000	90	230.000.000
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis			0		73	170.000.000	80	180.000.000	85	185.000.000	90	190.000.000	90	195.000.000
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			0		73	133.117.000	80	130.000.000	85	140.204.684	90	155.001.231	90	160.000.000
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			0		73	100.000.000	80	120.000.000	85	130.000.000	90	140.000.000	90	150.000.000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			70	300.000.000	73	110.000.000	80	120.000.000	85	130.000.000	90	150.000.000	90	155.000.000
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0		73		80	100.000.000	85	116.000.000	90	120.000.000	90	125.000.000
02.16.03.2.01	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		%	40	60	3.242.240.000	65	5.002.680.000	70	5.245.834.500	75	5.369.821.722	80	5.558.766.685	85	5.503.583.020
02.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				60	221.000.000	60	1.147.000.300	70	1.180.000.000	75	1.198.410.200	80	1.213.523.243	85	1.260.322.010
02.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			0		60	47.000.300	70	55.000.000	75	60.000.000	80	65.000.000	85	50.000.000
02.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			60	221.000.000	60	100.000.000	70	105.000.000	75	110.000.000	80	115.100.243	85	110.322.010
02.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			0		60	1.000.000.000	70	1.020.000.000	75	1.028.410.200	80	1.033.423.000	85	1.100.000.000

02.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		40	60	3.021.240.000	60	3.855.679.700		4.065.834.500		4.171.411.522		4.345.243.442		4.243.261.010
02.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		60	221.000.000	60	100.000.000		110.214.000		120.000.000		125.000.000		110.000.000
02.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		60	200.240.000	60	150.000.000		155.220.000		160.000.000		165.000.000		150.221.010
02.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		0		60	1.600.000.000		1.610.400.500		1.640.200.411		1.672.243.442		1.680.020.000
02.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		0		60	250.000.000		255.000.000		258.200.000		260.000.000		250.000.000
02.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		0		60	120.000.000		125.000.000		129.011.111		130.000.000		120.000.000
02.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		0		60	120.000.000		125.000.000		128.000.000		130.000.000		130.000.000
02.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		0		60	500.000.000		515.000.000		520.000.000		600.000.000		550.020.000
02.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		0		60	70.679.700		80.000.000		85.000.000		100.000.000		90.000.000
02.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		0		60	750.000.000		775.000.000		778.000.000		778.000.000		778.000.000
02.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		60	2.600.000.000	60	95.000.000		100.000.000		115.000.000		116.000.000		116.000.000
02.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		0		60	100.000.000		115.000.000		118.000.000		119.000.000		119.000.000
02.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		0		60			100.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		70	70	243.712.000	73	808.944.000	76	881.944.000	79	937.749.818	82	1.008.814.372	85	1.037.968.157
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		70	70	243.712.000	73	808.944.000	76	881.944.000	79	937.749.818	82	1.008.814.372	85	1.037.968.157
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		70	70	243.712.000	73	808.944.000	76	881.944.000	79	937.749.818	82	1.008.814.372	85	1.037.968.157
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		70	103.201.000	73	136.600.000	76	150.000.000	79	165.100.203	82	166.200.000	85	168.000.000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		70	140.511.000	73	184.300.000	76	200.000.000	79	231.100.000	82	231.100.110	85	234.423.013

2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			0	73	126.500.000	76	150.104.000	79	153.000.000	82	153.102.111	85	155.521.042		
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS			0	73	115.044.000	76	124.520.000	79	127.525.403	82	127.412.151	85	128.524.102		
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik			0	73	121.300.000	76	128.000.000	79	130.524.212	82	200.000.000	85	220.000.000		
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun			0	73	125.200.000	76	129.320.000	79	130.500.000	82	131.000.000	85	131.500.000		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				30	50	413.440.000	53	354.800.000	55	382.987.500	58	403.570.125	61	430.057.688	64	438.311.554
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50	413.440.000	53	354.800.000	55	382.987.500	58	403.570.125	61	430.057.688	64	438.311.554
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					50	413.440.000	53	269.800.000	55	292.907.500	58	310.570.125	61	330.057.688	64	334.311.554
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			50		153.220.000	53	50.000.000	55	55.336.300	58	60.000.000	61	63.000.000	64	64.000.000
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0			53	82.000.000	55	85.534.200	58	89.000.000	61	92.000.000	64	93.000.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			50		260.220.000	53	60.000.000	55	72.011.000	58	77.230.000	61	85.024.444	64	86.110.322
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			0			53	77.800.000	55	80.026.000	58	84.340.125	61	90.033.244	64	91.201.232
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				50		-	53	85.000.000	55	90.080.000	58	93.000.000	61	100.000.000	64	104.000.000
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			50			53	85.000.000	55	90.080.000	58	93.000.000	61	100.000.000	64	104.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan- penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate bertanggungjawab atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kominfo, Statistik dan persandian yang dapat disajikan dalam table 7.1 berikut ;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Ternate 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Rumus	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Menghilangkan Budaya Primordalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Optimalnya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Perhitungan nilai SPBE dilakukan oleh Kementerian KOMINFO dan Kementerian PANRB	0	1,8	1,8 – 2,6	2,6 – 3,5	3,5 – 4,2	4,2 – 5,0
		Jumlah Kecamatan yang terkoneksi layanan berbasis internet dan jaringan telekomunikasi Radio	Area Kecamatan yang terintegrasi dengan jaringan internet dan jaringan Telekomunikasi Radio dibagi Wilayah Kecamatan Lingkup Kota Ternate dikali 100%	44%	50%	75%	81%	88%	95%
		Jumlah layanan masyarakat yang bisa dilaksanakan secara online	Jumlah Layanan Pemerintah berbasis aplikasi dibagi target layanan Pemerintah Kota Ternate berbasis aplikasi dikali 100%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
		Jumlah fasilitas publik yang terkoneksi dengan jaringan internet	Jumlah Konektifitas Internet Layanan Publik (Hotspot) dibagi Jumlah Ruang Publik di wilayah Kota Ternate dikali 100%	22,9%	57,1%	64,3%	71,4%	78,6%	92,9%
		Indeks Keamanan Informasi	Indeks KAMI ISO/IEC 27001:2013	174	270	312	455	535	645
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Jumlah Data Base informasi daerah yang akurat	Jumlah Data Base Tersedia dibagi dengan target Data base Prangkat Daerah pada Pemerintah Kota Ternate dikali 100%	34,4%	40,6%	46,9%	50,0%	62,5%	75,0%
		Jumlah jenis media penyebaran informasi dan teknologi yang digunakan	Jumlah Promosi dan Publikasi yang dilaksanakan tiap Tahun dibagi dengan Target Jumlah Promosi dan Publikasi per tahun dikali 100%	50,0%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%	95,0%
		Frekuensi penyampaian informasi setiap tahun	Jumlah Jenis Media yang digunakan dibagi dengan Jumlah target Media per Tahun dikali 100%	74,6%	78,1%	82,3%	83,3%	89,6%	93,8%
		Luas wilayah cakupan penyampaian informasi publik	Jumlah Kecamatan yang terakses Media Informasi dibagi dengan Jumlah Kecamatan Lingkup Pemkot Ternate dikali 100%	25,0%	37,5%	62,5%	75,0%	93,8%	100,0%
		Presentasi PD yang melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem keterbukaan Informasi dibagi dengan Jumlah Keseluruhan PD Pemkot Ternate dikali 100%	64,3%	71,4%	83,3%	90,5%	95,2%	97,6%

BAB VIII

PENUTUP

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2021 merupakan Priode ke-2 sejak pembentukan Tahun 2016. Dalam perjalanan pelaksanaan tugas periode Pertama masih terdapat beberapacapaian kinerja yang tidak mencapai target akibat beberapa kendala sehingga menjadi pekerjaan rumah pada periode selanjutnya. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan dan Perencanaan yang dilakukan secara sistematis dan didukung anggaran yang represntatif, Target capaian yang tertunda bisa dituntaskan dengan baik. Seluruh jajaran Diskominfo agar dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Ternate merupakan aset yang berharga bagi terwujudnya Kota Cerdas (Smart City).

Dengan telah tersusunnya renstra ini maka Diskominfo Kota Ternate harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Ternate dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian diharapkan dapat menjadi garda utama dalam pencapaian Visi Kota Ternate sebagai kota jasa yang unggul, nyaman dan sejahtera.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2021-2026 diharapkan dapat memberikan panduan dan arahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas untuk menukseskan Visi dan Misi Walikota hingga akhir Periode.